

**SAMBUTAN  
PADA  
KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA PEREMPUAN  
DI LEMBAGA PEMERINTAH**

*Serpong, 27 April 2016*

**Yang saya hormati :**

- Sdr. Walikota Tangerang Selatan, Ibu Airin
- Sdr. Kepala Badan PMPP KB Kota Tangsel
- Para undangan, dan hadirin, yang saya hormati

***Assalamu'alaikum Wr.Wb***

**Selamat pagi dan Salam Sejahtera untuk Kita Semua**

- Pertama-tama perkenankan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan ridho-Nya kita dapat berada di tempat ini dalam keadaan sehat wal afiat, untuk mengikuti kegiatan Peningkatan Peran Serta Perempuan dilembaga Pemerintah dalam rangka Peringatan Hari Kartini.

- Saya menyambut gembira dan menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Badan PMPPKB Kota Tangerang Selatan yang menyelenggarakan acara ini. Dengan kegiatan seperti ini diharapkan dapat meneladani Spirit Kartini dalam Kepeloporan Perempuan Indonesia.
- Kartini dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Hal ini dimulai ketika Kartini merasakan banyaknya diskriminasi yang terjadi antara pria dan wanita pada masa itu, dimana beberapa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Kartini sendiri mengalami kejadian ini ketika ia tidak diperbolehkan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Larangan untuk Kartini mengejar cita-cita bersekolahnya muncul dari orang yang paling dekat dengannya, yaitu ayahnya sendiri. Ayahnya bersikeras Kartini harus tinggal di rumah karena usianya sudah mencapai 12 tahun, berarti ia sudah bisa dipingit.

Selama masa ia tinggal di rumah, Kartini kecil mulai menulis surat-surat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda, dimana ia kemudian mengenal Rosa Abendanon yang sering mendukung apapun yang direncanakan Kartini. Dari Abendanon jugalah Kartini kecil mulai sering membaca buku-buku dan koran Eropa yang menyulut api baru di dalam hati Kartini, yaitu tentang bagaimana wanita-wanita Eropa mampu berpikir sangat maju.

sementera melihat perempuan-perempuan Indonesia saat itu ada pada strata sosial yang amat rendah.

- Belajar dari sejarah perjuangan Kartini tersebut, Peringatan Hari Kartini hari ini merupakan momentum dalam rangka meningkatkan semangat untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan kemajuan perempuan secara umum. Peringatan Hari Kartini juga harus menjadi cambuk pengingat bagi seluruh bangsa Indonesia agar terus memperjuangkan upaya menekan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan ketidaksetaraan atau ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan.
- Indikator kualitas sumber daya manusia, secara makro diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM mengukur kapabilitas dasar manusia pada bidang: kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan ( Rata-rata lama sekolah dan harapan rata-rata lama sekolah), dan ekonomi (produk domestik bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli). Sedangkan untuk mengukur tingkat disparitas gendernya menggunakan Indikator Pembangunan Gender ( IPG). Berdasarkan publikasi *Human Development Report* (HDR) 2012-2013, Indonesia berada pada peringkat ke 5 dari 10 Negara ASEAN dan Peringkat 108 dari seluruh negara-negara didunia. Sementara nilai IPG berdasarkan hasil penghitungan BPS, pada tahun 2013 sebesar 69,57 artinya

masih terdapat kesenjangan yang cukup besar apabila kita bandingkan dengan kualitas hidup laki-laki.

- Beberapa aspek penting yang merupakan penghambat upaya peningkatan kualitas hidup perempuan antara lain ditunjukkan pada capaian beberapa bidang sebagai berikut:

**1) Dibidang Pendidikan,** bahwa capaian rata-rata lama sekolah anak Indonesia, pada tahun 2014 adalah 8,24 tahun untuk laki-laki, dan 7,23 tahun untuk perempuan. Artinya secara rata-rata pendidikan penduduk perempuan di Indonesia hanya tamatan Sekolah Dasar (SD), atau kelas 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

**2) Dibidang Kesehatan:** Pelayanan kesehatan pada perempuan di Indonesia (khususnya ibu pada masa kehamilan dan melahirkan) masih perlu mendapatkan perhatian secara serius. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia menandakan kualitas layanan kesehatan perempuan masih memprihatinkan.. Tahun 2015 dimana Tahun tersebut MDGs berakhir Angka Kematian Ibu (AKI) berada di angka 259/100.000 kelahiran hidup, sedangkan MDGs menargetkan 102/100.000; Untuk itu diperlukan akses menyeluruh pada pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual, termasuk program keluarga berencana, informasi dan

pendidikan serta pengintegrasian kesehatan reproduksi dalam program dan strategi nasional.

**3) Dibidang ekonomi:** Masih terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, hal ini disebabkan oleh aksesibilitas perempuan dalam kesempatan kerja, sehingga akumulasi upah perempuan secara keseluruhan menjadi sangat rendah. Kontribusi sumbangan pendapatan masih tertinggal jauh dari laki-laki. Pada tahun 2014 sumbangan pendapatan perempuan baru mencapai 35,64. Keterlibatan perempuan dalam ketenaga kerjaan sebagai pengusaha hanya 31,44 % dan laki-laki 68,56%, ada 3.218,043 perusahaan/usaha IMK (industri mikro dan kecil ) yang tersebar di 33 provinsi. Proporsi perempuan pekerja tanpa imbalan jasa lebih tinggi jumlahnya dari pada laki-laki. Akumulasi kondisi-kondisi tersebut yang menyebabkan pengeluaran per kapita perempuan jauh tertinggal dari laki-laki.

Dalam upaya pemberdayaan perempuan ekonomi produktif Kementerian PP dan PA memberikan perhatian pada Pemberdayaan Industri Rumahan. Karena Industri rumahan pelakunya sebagian besar adalah perempuan. Untuk itu Kementerian PP dan PA mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap para pelaku industri rumahan, untuk dibina dan dibimbing mulai dari pemula,

berkembang dan maju yang selanjutnya menjadi pengusaha kecil.

- 4) Dibidang Politik dan Pengambilan Keputusan:** perempuan di **Legislatif** hasil Pemilu 2014: DPR: 17,32%; DPD: 25,76%; DPRD Provinsi: 16,15% dan DPRD Kab/Kota: 14.15%. masih jauh dari target yang akan kita upayakan, yaitu 30 persen sebagaimana kuota yang ditetapkan. Perempuan di **Eksekutif**: Menteri: 23,5%; Gubernur: 0%, Eselon I; 20,9%; Eselon II: 15%; Eselon III: 20,6% dan Eselon IV: 33%; perempuan di **Yudikatif**: MA: 12%, MK: 11%, Komisi Yudisial: 0%, KPK: 20% dan KPU: 14%.

Pemerintah melakukan pemetaan secara seksama untuk mengetahui representasi dan kebutuhan perempuan baik sebagai pemilih maupun sebagai calon, serta memberikan informasi dan pelatihan pada politik dan kepemimpinan untuk perempuan.

- 5)** Kemudian berbagai kasus terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak juga merupakan faktor penghambat pada upaya peningkatan kualitas dan peran perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Angka kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang menunjukkan peningkatan. Data Komnas Perempuan pada 2014 menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220

kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus. Korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) setiap tahun sedikitnya 450.000 orang (70%-nya adalah perempuan) pada umumnya mereka diberangkatkan sebagai tenaga kerja ke luar negeri. Dari jumlah tersebut, sekitar 46% terindikasi kuat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

- Ketimpangan dan kurangnya peran serta perempuan dan rendahnya Kualitas Hidup Perempuan (KHP), secara umum mengakibatkan lambatnya keberhasilan dalam Pembangunan Nasional. Kemajuan perempuan sebagai prasyarat peningkatan kualitas manusia Indonesia karena a). Separuh penduduk adalah perempuan, jika kualitasnya buruk, maka keseluruhan kualitas manusia rendah, b). Perempuan adalah bagian keluarga yang menentukan kualitas generasi penerus, c). Potensi perempuan sangat besar, harus diberi ruang dan peluang yang besar agar kontribusinya maksimal, d). Perempuan dan laki-laki mempunyai potensi pada bidang-bidang yang saling melengkapi.
- Maka untuk mengatasinya diperlukan upaya kebijakan dan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan pertama, meningkatkan kualitas hidup perempuan, kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang, ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

- Sejalan dengan hal tersebut Kementerian PP dan PA pada Tahun Anggaran 2016 menetapkan 3 (tiga) program prioritas yang disebut dengan **Three end** (3 end) yang meliputi:
  - 1) Akhiri kekerasan kepada perempuan dan anak.
  - 2) Akhiri perdagangan perempuan, dan
  - 3) Akhiri ketidakadilan akses ekonomi terhadap perempuan
- Meskipun dalam beberapa bidang perempuan masih tertinggal, namun di mata dunia, kemajuan kesetaraan gender di Indonesia patut diapresiasi. Forum PBB bulan September 2015 lalu di New York, seluruh negara anggota PBB bersama UN Woman memasukan Indonesia sebagai satu dari 10 negara yang dipersiapkan untuk menuju Planet 50:50 pada 2030 mendatang.
- Dengan demikian tugas berat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawa perempuan setara dengan laki-laki, tidak lagi seperti saat ini 30 perempuan dan laki-laki 70. Forum tersebut juga mengampanyekan gerakan "He for She", sebagai upaya memperluas komitmen laki-laki yang memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan, sehingga memperoleh akses kesehatan, pendidikan, ekonomi.
- Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga pada kegiatan hari ini dapat menginspirasi para peserta untuk terus

memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan Indonesia, dan meningkat kiprahnya di bidang politik dan pengambilan Keputusan melalui dukungan politik bagi terselenggarakan program Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

**Terima kasih.**

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menteri  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Yohana Susana Yembise